

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Muchsin. (2021). *Perlindungan Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nanda. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Bandung: Widina media utama
- Prawirohamidjojo, M., & Pohan, H. (2000). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardjo, S. (2003). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, M. A. (2014). *Filsafat Hukum: Memahami Hukum dalam Konteks Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saptosih. (2020). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: (KDRT) dan Hak asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saptosih. (2020). *Menilik Kupasan Kasus-Kasus KDRT*. Yogyakarta
- Setiady, T. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Bandung: Refika Aditama.
- Soleman, F. S., & Elindawati, D. (2019). *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Perempuan*. Jakarta: Kencana.
- Subekti. (2000). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Wahyudi, A. (2014). *Pancasila dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

C. Sumber Lain

1. Jurnal

- Andriani, S. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. **Jurnal HAM**, 13(2), 155–172.
- Fitria, H. (2021). *Perkawinan Dini Ditinjau dari Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. **Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi**, 9(1), 45–58.
- Izzati, I. (2020). *Pernikahan Dini sebagai Pelanggaran Hak Anak: Kajian dalam Perspektif HAM dan Hukum Nasional*. **Jurnal Konstitusi**, 17(3), 532–551.

2. Website/Internet

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2023). Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Diakses dari: <https://www.kemenpppa.go.id>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2022). Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022.

Diakses dari: <https://komnasperempuan.go.id>

Mahkamah Agung RI. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Diakses dari: <https://www.mahkamahagung.go.id>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). Pernikahan Anak dan Tantangan Masa Depan Generasi Emas 2045.

Diakses dari: <https://www.bkkbn.go.id>

UNICEF Indonesia. (2020). Pernikahan Anak di Indonesia: Analisis Situasi dan Solusi.

Diakses dari: <https://www.unicef.org/indonesia/id>

Komnas HAM RI. (2021). Pernikahan Anak sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Diakses dari: <https://www.komnasham.go.id>